



## **Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau**

**Nama** : Almasdi Syahza  
**Fakultas** : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
**Telp.** : 0812 7533 089

Sejak pasca krisis tahun 1998 perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara tajam yakni pada tahun 1998 luas perkebunan kelapa sawit 901.276 ha meningkat menjadi 2.056.008 ha pada akhir tahun 2010. Selama periode tahun 2001-2010 tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sementara komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa luas arealnya justru mengalami penurunan.

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Usahatani kelapa sawit memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan. Hasil survei tahun 2011 pendapatan petani kelapa sawit di pedesaan berkisar UD\$4.600-UD\$5.500 per tahun.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Dampak lain yakni terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengetaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Dampak aktivitas tersebut terlihat dari indikator, antara lain: 1) usahatani kelapa sawit telah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Perbandingan pendapatan antara 40% terendah dengan masyarakat 20% tertinggi sebesar 1,23; 2) tekanan penduduk tanpa subsektor perkebunan sudah melebihi kapasitas kemampuan lahan (>1) yakni sebesar 11,04 pada tahun 2008; 3) daya dukung lahan (DDL) di Daerah Riau sangat tinggi sekali yakni sebesar 138,77; 4) lahan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian ketersediaannya semakin terbatas; 5) pembangunan perkebunan kelapa sawit telah meningkatkan jumlah uang beredar di pedesaan. Kondisi ini menuntut kebutuhan masyarakat untuk berdirinya kelembagaan yang menangani kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Lembaga yang terbentuk adalah bank perkreditan rakyat (BPR), bank unit desa oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) bank cabang pembantu dari bank pemerintah lainnya seperti Bank Riau Kepri, Bank BNI, Bank Mandiri. Jumlah uang beredar juga telah menciptakan daya beli dan membuka peluang kerja dan usaha di daerah sekitar pengembangan perkebunan.

Hasil perhitungan daya dukung wilayah (DDW) diperoleh angka indeks sebesar 4,854. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Kedepan pertambahan PKS untuk wilayah pedesaan diperlukan sebanyak 63 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam. Namun pembangunan perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan penyebaran kebun petani, terutama petani swadaya.

Guna mengendalikan pembangunan perkebunan kelapa sawit ke depan atau pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (*sustainable*) maka ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1) ekologi yaitu unsur: kebutuhan lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi); 2) ekonomi yang merupakan: ketahanan pangan, kelayakan ekonomi yang bernuansa teknologi, dan 3) sosial berupa pemberdayaan masyarakat, kesamaan sosial, kesehatan dan keselamatan penduduk.

